

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif memprediksi tindakan seperti memilih kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dan bagaimana manajer perusahaan akan merespon terhadap suatu standar akuntansi yang diusulkan (Scott, 2012:304). Teori akuntansi positif menganggap bahwa perusahaan mengorganisir dirinya sendiri dengan cara yang paling efektif untuk memaksimalkan prospek kelangsungan hidup perusahaan. Cara yang paling efisien untuk dipakai dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor lingkungan, teknologi, dan tingkat persaingan antar perusahaan.

Perusahaan dapat dilihat sebagai kontrak-kontrak yang saling berhubungan, karena perusahaan dapat dideskripsikan sebagai kumpulan kontrak (Scott, 2012:305). Sebagai contoh, kontrak dengan karyawan, pemasok, dan penyedia modal. Oleh karena itu perusahaan ingin meminimalisir biaya kontrak seperti biaya negosiasi serta biaya tambahan yang muncul karena adanya *moral hazard* dan pengawasan performa kontrak. Kontrak yang memiliki biaya kontrak yang rendah dapat disebut *efficient contract* atau kontrak efisien. Ada berbagai macam kontrak yang melibatkan variabel-variabel akuntansi, contohnya promosi karyawan dan upah karyawan yang didasarkan pada pengukuran kinerja perusahaan berbasis akuntansi seperti laba bersih atau target penjualan.

Teori akuntansi positif berargumen bahwa kebijakan akuntansi perusahaan menjadi salah satu masalah untuk mencapai tata kelola perusahaan. Manajemen perusahaan diberi keleluasaan untuk memilih kebijakan akuntansi yang akan digunakan. Dengan keleluasaan tersebut, manajemen perusahaan cenderung memilih kebijakan yang didasarkan pada kepentingan sendiri. Teori akuntansi positif mengasumsikan bahwa manajemen perusahaan sama rasionalnya dengan investor dan akan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, manajemen perusahaan tidak akan memaksimalkan

pendapatan perusahaan begitu saja. Manajemen perusahaan akan memaksimalkan pendapatan perusahaan apabila mereka juga akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut (Scott, 2012:306).

Watts dan Zimmerman (1986, dalam Bwarleling, 2017) menyatakan ada tiga hipotesis yang dirumuskan dalam teori akuntansi positif atau *positive accounting theory*, yaitu:

1. Hipotesis rencana bonus (*bonus plan hypothesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajemen perusahaan akan cenderung meningkatkan laba yang diperoleh dan dilaporkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh atau menaikkan bonus yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan manajemen perusahaan dengan cara memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan pada periode tersebut.

2. Hipotesis perjanjian utang (*debt covenant hypothesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa manajemen perusahaan akan cenderung memilih prinsip akuntansi yang dapat menambah pendapatan perusahaan apabila perusahaan berpeluang besar untuk melanggar kesepakatan dalam perjanjian utang. Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi yang dapat menambah pendapatan di periode ini. Tindakan tersebut dilakukan untuk menghindari *default technic*. Banyak perjanjian yang mensyaratkan perusahaan peminjam untuk mempertahankan rasio keuangan di tingkat tertentu, modal kerja, atau ekuitas pemegang saham. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perusahaan akan dikenai penalti.

3. Hipotesis biaya politik (*political cost hypothesis*)

Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung akan memilih metode akuntansi yang akan mengurangi laba yang dilaporkan di laporan keuangan. Perusahaan yang berukuran besar biasanya juga memiliki standar kinerja yang tinggi pula, contohnya berkenaan dengan tanggung jawab lingkungan karena perusahaan besar dianggap lebih mampu dibandingkan perusahaan kecil.

Keterkaitan antara teori akuntansi positif dengan penelitian ini berkaitan dengan *political cost hypothesis*, yaitu semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan akan semakin konservatif dalam melaporkan pendapatannya. Perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih diperhatikan oleh pemerintah (Ramadona, 2016). Selain itu, perusahaan berukuran besar juga diawasi dengan ketat oleh investor, asosiasi perdagangan, serta regulator (Pravita dan Yadnyana, 2017). Oleh karena itu semakin besar ukuran perusahaan akan semakin konservatif untuk menghindari biaya politis yang terlalu besar.

2.1.2 Teori Keagenan

Teori keagenan atau *agency theory* menyatakan bahwa perusahaan merupakan *intersection point* bagi hubungan kontrak antara pemilik perusahaan, manajemen, investor, kreditor, dan pemerintah (Agustina, dkk., 2015). Jensen dan Meckling (1976, dalam Layyinaturobanayah, Sudarsono, dan Fitriyana, 2014) menyatakan bahwa teori keagenan muncul karena terdapat kontrak antara *principal* dan *agent*. Hubungan agensi dapat terjadi ketika pemilik sumber daya (*principal*) mempercayakan sumber daya yang dimiliki kepada pengelola (*agent*). Inti dari hubungan keagenan ini adalah adanya pemisahan fungsi antara pihak yang memiliki sumber daya dengan pihak yang mengelola sumber daya. Dalam hubungan ini *principal* mempercayakan kepada *agent* untuk mengelola dan mengambil keputusan terkait sumber daya.

Hubungan keagenan antara *principal* dan *agent* akan selalu dihadapkan dengan adanya masalah terkait *asymmetric information* atau adanya ketidakrataan penguasaan informasi. Masalah ini terjadi karena *agent* cenderung memiliki lebih banyak informasi terkait perusahaan. Kondisi ini memungkinkan *agent* untuk melakukan tindakan atau mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Masalah dalam hubungan antara *principal* dengan *agent* muncul saat adanya perbedaan kepentingan yang muncul (Ramadona, 2016). *Principal* cenderung memiliki keinginan untuk meningkatkan kemakmuran, yaitu dengan nilai perusahaan yang meningkat. Di sisi lain, *agent* memiliki tujuan memperoleh imbalan berupa gaji, bonus, atau kompensasi lainnya (Jensen dan Meckling, 1976;

dalam Layyinaturobanayah dkk., 2014). Hal-hal tersebut dapat menjadi alasan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Manajemen laba dapat dilakukan manajemen karena manajemen mempunyai wewenang untuk memilih kebijakan yang akan digunakan oleh perusahaan. Sikap oportunistik yang dimiliki oleh manajemen adalah alasan mengapa manajemen melakukan manajemen laba. Manajemen berusaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri, walaupun itu berarti dengan cara menyesatkan kreditor serta investor. Oleh karena itu, penerapan konservatisme dalam perusahaan dapat menjadi alat untuk menahan sikap oportunistik manajemen agar tidak memberi informasi yang menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan.

Konflik keagenan yang dapat diminimalisir dengan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan (Liviani, Mahadwartha, dan Wijaya, 2016). Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui salah satunya kepemilikan manajerial. Dengan adanya kepemilikan manajerial, diharapkan dapat menyamakan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Konflik keagenan yang terjadi dapat menimbulkan adanya biaya tambahan, yaitu biaya keagenan atau *agency cost*. *Agency cost* timbul untuk menyamakan kepentingan antara kedua belah pihak. Jensen dan Meckling (1976, dalam Liviani dkk., 2016) menyatakan bahwa *agency cost* terdiri dari 3 hal:

1. Biaya *monitoring*. Biaya ini timbul karena adanya pengawasan yang dilakukan oleh *principal* atas aktivitas *agent*.
2. Biaya *bonding*. Biaya ini timbul karena adanya usaha dari *agent* atau manajemen perusahaan untuk meyakinkan *principal* bahwa *agent* telah bertindak dan bekerja sebagaimana mestinya sesuai dengan kontrak.
3. Biaya *residual*. Biaya ini timbul karena adanya perbedaan antara keputusan yang diambil oleh *agent* dengan keputusan yang sebenarnya dapat memaksimalkan kemakmuran *principal*.

Keterkaitan antara teori keagenan ini dengan penelitian adalah saat terjadi masalah dalam hubungan keagenan maka semakin besar pula proteksi yang dilakukan oleh *principal*. Dengan demikian, saat *leverage* perusahaan tinggi, kreditor akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap manajemen perusahaan

yang mengelola sumber dayanya. Dengan demikian diharapkan manajemen akan bersikap lebih konservatif atau berhati-hati dalam melaporkan laba perusahaan dan tidak melakukan perekayasaan laba. Keterkaitan lain antara teori keagenan ini dengan penelitian adalah adanya masalah dalam hubungan antara *principal* dengan *agent* muncul saat adanya perbedaan kepentingan yang muncul (Ramadona, 2016). Manajemen perusahaan cenderung mengambil kebijakan dengan tujuan keuntungan sendiri. Pada saat mengalami kesulitan keuangan, manajemen perusahaan akan kurang konservatif dalam melaporkan kondisi perusahaan. Keputusan tersebut diambil dengan tujuan agar *principal* tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya pada perusahaan.

2.1.3 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Seberapa bermanfaat informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan tersebut sangat erat kaitannya dengan kriteria yang menjadi pedoman kebijakan akuntansi. Kebermanfaatan adalah karakteristik yang hanya bisa diukur secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, serta keyakinan pemakai atas informasi yang diperoleh. Dengan alasan tersebut, maka kriteria dalam penyusunan laporan keuangan umumnya disebut karakteristik kualitatif (Suwardjono, 2014:169). PSAK No 1 tahun 2017 menyatakan bahwa ada dua karakteristik kualitatif fundamental dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu relevansi dan representasi tepat.

1. Relevansi

Relevansi adalah kemampuan informasi untuk membantu pengguna laporan keuangan membedakan beberapa alternatif dan dengan demikian pengguna laporan keuangan akan dapat mengambil keputusan dengan mudah. Dalam laporan keuangan, relevansi yang dimaksud adalah kemampuan informasi untuk menyusun prediksi-prediksi mengenai beberapa hasil (*outcome*) dari

kejadian yang terjadi baik di masa lalu, sekarang, atau masa depan dalam rangka membantu pemakai laporan keuangan. Penerapan prinsip konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan dianggap dapat meningkatkan relevansi nilai laba perusahaan. Hal tersebut karena konservatisme dapat menyediakan informasi yang lebih baik mengenai prediksi terkait prospek ekonomi perusahaan di masa depan dalam ketidakpastian yang ada dalam lingkungan bisnis.

2. Representasi tepat

Representasi tepat merupakan kesesuaian antara suatu fenomena dengan deskripsi dari fenomena tersebut. Dalam penyusunan laporan keuangan, contoh dari fenomena yang dideskripsikan adalah kondisi keuangan, kegiatan ekonomi perusahaan, dan kewajiban keuangan. Ada dua hal yang menyangkut representasi tepat dalam akuntansi, yaitu ketepatan deksripsi dan validitas pengukuran.

2.1.4 Ukuran Perusahaan

Purnama dan Daljono (2013, dalam Susanto dan Ramadhani, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai perbandingan besar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari berbagai cara, antara lain melalui total penjualan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan total aset perusahaan (Nurhotimah, 2015; dalam Rahayu dan Sopian, 2017). Perusahaan yang memiliki total aset tinggi cenderung memiliki arus kas positif dan mempunyai propek yang bagus dalam jangka panjang. Selain itu, semakin besar perusahaan maka perusahaan cenderung lebih stabil dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil (Nurhotimah, 2015; dalam Rahayu dan Sopian, 2017). Apabila sebuah perusahaan tergolong perusahaan besar maka pemerintah akan semakin meningkatkan pengawasannya atas perusahaan (Ramadona, 2016). Akan tetapi perusahaan yang berukuran besar juga memiliki beberapa keuntungan dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar cenderung lebih mudah memperoleh dana yang berasal dari pasar modal dan dapat memperoleh laba yang lebih besar.

Di Indonesia, UU No.20 tahun 2008 mengelompokkan perusahaan menjadi 4 macam berdasarkan ukuran perusahaan, yaitu:

1. Usaha mikro

Memiliki total aset maksimal Rp 50.000.000 dan penjualan tahunan maksimal Rp 300.000.000,

2. Usaha kecil

Memiliki total aset antara Rp50.000.000 sampai Rp 500.000.000 dan penjualan tahunan antara Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000.

3. Usaha menengah

Memiliki total aset antara Rp 500.000.000 sampai Rp 10.000.000.000 dan penjualan tahunan antara Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000.

4. Usaha besar

Memiliki total aset di atas Rp 10.000.000.000 dan penjualan tahunan di atas Rp 50.000.000.000

Dalam peraturan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) ada dua papan pencatatan untuk mencatat saham, yaitu papan utama dan papan pengembangan. Kedua papan tersebut ditujukan untuk ukuran perusahaan yang berbeda. Untuk perusahaan berskala besar maka akan dicatat di papan utama, sedangkan untuk perusahaan yang belum memenuhi syarat menjadi perusahaan berskala besar akan dicatat di papan pengembangan. Salah satu syarat agar perusahaan dapat dicatat di papan utama adalah memiliki total aset berwujud sebesar minimal Rp 100.000.000.000. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menurut aturan BEI suatu perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar apabila memiliki total aset berwujud minimal Rp 100.000.000.000.

2.1.5 Leverage

Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang digunakan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang (Lestari dan Nuzula 2016). *Leverage* juga sering disebut dengan rasio solvabilitas. Perusahaan yang mempunyai cukup aktiva untuk memenuhi kewajibannya disebut perusahaan yang *solvable* sedangkan perusahaan yang tidak

mempunyai cukup aktiva untuk memenuhi kewajibannya disebut perusahaan *insolvable* (Maretha, 2016). Lestari dan Nuzula (2016) menyatakan bahwa *leverage* terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. *Operating leverage*

Operating leverage muncul karena adanya *fixed operating cost* yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka memperoleh pendapatan. *Operating leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan *fixed operating cost* untuk memperbesar volume penjualan yang kemudian akan berpengaruh pada EBIT perusahaan.

2. *Financial leverage*

Financial leverage muncul karena perusahaan memiliki kewajiban-kewajiban finansial yang bersifat tetap (*fixed financial charges*) yang harus dipenuhi oleh perusahaan. *Financial leverage* dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menggunakan *fixed financial charges* dalam rangka memperoleh pendapatan bagi perusahaan yang kemudian juga akan berpengaruh terhadap EPS.

3. *Total leverage*

Total leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan bagi perusahaan yang kemudian akan berpengaruh terhadap EPS. Biaya yang dimaksud adalah *fixed operating cost* dan *fixed financial charges*.

Fahmi (2017:127, dalam Febrianti, 2016) menyatakan bahwa secara umum ada rasio *leverage* terdiri dari beberapa macam. Macam-macam *leverage* tersebut antara lain *debt ratio*, *debt to equity ratio*, dan *time interest earning*. Dalam penelitian ini, rasio *leverage* yang akan digunakan adalah *debt to equity ratio*. *Debt to equity ratio* ini dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan (Mariani, Rasmini, dan Mimba, 2016). Rasio ini merupakan salah satu cara yang baik untuk menguji kekuatan keuangan suatu perusahaan.

Semakin rendah rasio *leverage* maka kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya juga semakin baik (Dewi dan Suryanawa, 2014).

Sebaliknya, apabila *leverage* tinggi maka risiko keuangan bagi kreditor juga makin tinggi. Hal tersebut karena *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai masalah keuangan sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajiban perusahaan. Oleh karena itu, kreditor memiliki hak untuk melakukan pengawasan karena kreditor memiliki kepentingan untuk mengamankan dananya (Fitri, 2017).

2.1.6 *Financial Distress*

Financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu keadaan dimana perusahaan mengalami laba negatif selama lebih dari satu periode berturut-turut (Carolina, Marpaung, dan Pratama, 2017). Kondisi ini dimulai dari ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek. Kondisi tersebut dapat memberikan sinyal mengenai gejala awal kebangkrutan perusahaan (Ali, 2009 dalam Rahayu dan Sopian, 2017). Kondisi keuangan yang melemah dapat dilihat dari beberapa gejala yang terjadi, diantaranya mengalami kerugian selama lebih dari satu periode, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, ataupun saat total utang lebih besar dibandingkan dengan total aset. Apabila perusahaan menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang lemah, maka hal tersebut dapat mempengaruhi *stakeholder* perusahaan terutama investor dan kreditor. Saat investor dan kreditor melihat kondisi perusahaan yang melemah, maka perusahaan akan kehilangan kepercayaan dari investor dan kreditor kemudian investor dan kreditor akan memutuskan untuk berhenti bekerja sama dengan perusahaan (Rahayu dan Sopian, 2017). Keadaan tersebut akan sangat berbahaya bagi perusahaan apabila manajemen perusahaan tidak dapat menemukan jalan keluarnya.

Brigham dan Daves (2008, dalam Mafiroh dan Triyono, 2016) menyatakan ada beberapa definisi dari *financial distress* menurut tipenya:

1. *Economic failure*

Keadaan ini terjadi saat pendapatan yang diperoleh perusahaan tidak dapat menutupi total biaya.

2. *Business failure*

Keadaan ini terjadi saat perusahaan menghentikan operasi perusahaannya karena perusahaan mengalami kerugian

3. *Technical insolvency*

Keadaan ini terjadi saat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Keadaan ini sebenarnya bisa saja terjadi hanya sementara, sehingga perusahaan akan dapat membayar setelah diberi waktu. Namun apabila perusahaan terus menerus tidak bisa memenuhi kebutuhan jangka pendeknya, maka ketidakmampuan perusahaan tersebut dapat menjadi tanda perusahaan tengah mengalami tahap pertama kebangkrutan.

4. *Insolvency in bankruptcy*

Keadaan ini dapat terjadi saat nilai buku hutang perusahaan lebih tinggi dibandingkan nilai pasar aset perusahaan saat ini. Hal ini dapat menandakan bahwa perusahaan tengah mengalami kesulitan keuangan dan menuju kebangkrutan.

5. *Legal bankruptcy*

Keadaan ini dapat terjadi saat perusahaan mengalami kegagalan kebangkrutan secara hukum dan mengajukan tuntutan resmi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Financial distress sangat perlu untuk terus dikembangkan karena perusahaan perlu mengetahui kondisi perusahaan itu sendiri dan waspada agar dapat dengan cepat melakukan tindakan untuk melindungi aset yang dimiliki perusahaan. Rismawati (2012) dalam Firmasari (2016) dan Wulandari (2016) menyatakan bahwa model-model yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesulitan keuangan perusahaan adalah:

1. Model Altman

Model ini dirumuskan oleh Altman dengan menggunakan 5 jenis rasio keuangan. Model Altman hanya dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur. Model *Z score* yang dirumuskan oleh Altman adalah sebagai berikut (Hanafi, 2014:656; dalam Wulandari, Burhanudin, dan Widayanti, 2017):

$$Z = 1,2 T_1 + 1,4 T_2 + 3,3 T_3 + 0,6 T_4 + 1,0T_5$$

Keterangan:

T_1 = Modal kerja bersih/total aset

T_2 = laba ditahan/total aset

T_3 = EBIT/total aset

T_4 = nilai pasar ekuitas/nilai buku total liabilitas

T_5 = penjualan/total aset

Dengan zona diskriminan:

Bila $Z \geq 3,00$ = keuangan perusahaan dianggap bagus dan aman

Bila $1,80 < Z < 3,00$ = perusahaan memiliki kemungkinan mengalami kebangkrutan

Bila $Z < 1,81$ = perusahaan sangat berpotensi untuk mengalami kebangkrutan

2. Model Modifikasi Altman

Model ini merupakan modifikasi dari model Altman sebelumnya, hanya saja model ini dapat digunakan untuk semua jenis perusahaan. Model yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Z = 6,56X_1 + 3,26X_2 + 6,72X_3 + 1,05X_4$$

Keterangan:

X_1 = modal kerja / total aset

X_2 = laba ditahan / total aset

X_3 = EBIT / total aset

X_4 = nilai buku ekuitas / nilai buku liabilitas

3. Model Ohlson

Model ini terdiri dari 9 variabel yang terdiri dari berbagai rasio keuangan. *Cut off point* dari model ini adalah 0,38. Model yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$Z = -1,32 - 0,407X_1 + 6,03X_2 - 1,43X_3 + 0,0757X_4 - 2,37X_5 - 1,83X_6 + 0,285X_7 - 1,72X_8 - 0,521X_9$$

4. Model Zmijewski

Model ini menggunakan 3 analisis rasio. Analisis rasio yang digunakan adalah ROA, *leverage*, serta *liquidity*. Model yang berhasil dikembangkan oleh Zmijewski adalah sebagai berikut:

$$X = -4,3 - 4,5 X_1 + 5,7 X_2 - 0,004 X_3$$

Keterangan:

X_1 = *Return on asset*

X_2 = *Debt to equity ratio*

X_3 = *Current ratio*

5. Model Springate

Model ini menggunakan 4 rasio keuangan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Tingkat keakuratan dari model ini adalah sebesar 92,5%. Model yang berhasil dikembangkan oleh Springate adalah sebagai berikut:

$$Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D$$

Keterangan:

A = modal kerja / total aset

B = EBIT / total aset

C = EBT / utang lancar

D = penjualan / total aset

Perusahaan akan diklasifikasikan mengalami kesulitan keuangan jika nilai $Z < 0,862$.

2.1.7 Konservatisme

Konservatisme adalah satu prinsip yang harus diikuti dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Konservatisme merupakan sikap ketika menghadapi adanya ketidakpastian dalam pengambilan keputusan berdasarkan hasil (*outcome*) terburuk dalam ketidakpastian tersebut (Suwardjino, 2014:245). Prinsip konservatisme menyatakan bahwa beban dan kewajiban diakui sesegera mungkin walaupun masih terdapat ketidakpastian, sedangkan pendapatan dan aset baru akan diakui saat sudah pasti bahwa pendapatan atau aset akan diterima (Ramadona,

2016). Konservatisme dapat diartikan sebagai reaksi kehati-hatian dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan bisnis yang ada (Firmasari, 2016). Ketidakpastian ekonomi dan bisnis dapat terjadi kapan saja sehingga perusahaan perlu berhati-hati dalam melaporkan labanya untuk menghindari laporan keuangan yang tidak andal. Menurut prinsip konservatisme, apabila perusahaan menghadapi beberapa pilihan mengenai prinsip atau teknik yang sama-sama diterima, maka perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengutamakan pilihan yang memiliki pengaruh keuntungan paling kecil (Belkaoui, 2011; dalam Firmasari, 2016).

Konservatisme seringkali disebut sebagai prinsip yang pesimis karena pendapatan pengakuan beban lebih cepat dibandingkan pengakuan pendapatan (Agustina, dkk., 2015). Konservatisme dapat membantu perusahaan untuk tidak terlalu optimis karena proses bisnis perusahaan tidak selalu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal tersebut karena manajemen ataupun pemilik perusahaan cenderung terlalu optimis dalam melaporkan pendapatannya (Watts, 2003 dalam Sumiari dan Wirama, 2014). Dengan demikian prinsip konservatisme ini dianggap dapat mengimbangi sikap terlalu optimis tersebut. Lebih lanjut, maka laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan dapat menjadi lebih *reliable*.

Setelah tahun 2012, standar akuntansi di Indonesia mengalami perubahan dari yang awalnya mengacu pada US GAAP menjadi IFRS (Fitri, 2017). Dalam IFRS, prinsip konservatisme mengalami sedikit perubahan. Konservatisme sekarang lebih diarahkan pada *prudence*. *Prudence* dan konservatisme sebenarnya hampir sama, hanya saja *prudence* lebih menekankan kepada kehati-hatian dalam penilaian yang diperlukan apabila dihadapkan dengan kondisi yang tidak pasti (Gunawan, 2015). Dengan *prudence*, pendapatan boleh diakui walaupun masih berupa potensi asalkan telah memenuhi ketentuan pengakuan pendapatan atau *revenue recognition* namun tetap menggunakan prinsip kehati-hatian untuk mengakui pendapatan tersebut (Aristiani, Suharto, dan Sari, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Salah satu penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh

Susanto dan Ramadhani (2016). Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh pada konservatisme. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh positif terhadap konservatisme sedangkan *leverage*, likuiditas, dan *growth opportunities* tidak berpengaruh terhadap konservatisme.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah variabel dependen, yaitu konservatisme. Sedangkan, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu variabel independen yang digunakan. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress* sebagai variabel independen, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Ramadhani (2016) menggunakan *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal, likuiditas, dan *growth opportunities* sebagai variabel independen. Perbedaan lain adalah tahun pengamatan. Tahun pengamatan dari penelitian ini adalah tahun 2015-2017 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Ramadhani (2016) menggunakan tahun 2010-2014 untuk tahun pengamatan.

Penelitian lain yang serupa dilakukan oleh Ramadana (2016) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap konservatisme akuntansi. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014. Penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap konservatisme. Di sisi lain, *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadana (2016) terletak pada variabel dependen. Kedua penelitian sama-sama menggunakan konservatisme sebagai variabel dependen. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadana (2016) terletak pada variabel independen. Penelitian Ramadana (2016) menggunakan struktur

kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan *leverage* sebagai variabel independen sedangkan penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress* sebagai variabel independen. Perbedaan lain terdapat pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadona (2016) menggunakan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2011-2014 sedangkan penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2017.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Agustina dkk. (2015) yang bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konservatisme akuntansi. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2011. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa ukuran perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal, struktur kepemilikan, dan *growth opportunities* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi. Di sisi lain, *leverage*, *tax*, dan litigasi tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dkk. (2015) terdapat pada penggunaan konservatisme sebagai variabel dependen penelitian. Perbedaan antara kedua penelitian terdapat pada variabel independen yang digunakan. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress* sebagai variabel independen sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Agustina dkk. (2015) menggunakan ukuran perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal, struktur kepemilikan, *growth opportunities*, *leverage*, *tax*, dan litigasi sebagai variabel independen. Perbedaan lain juga terdapat pada periode objek penelitian. Penelitian ini menggunakan periode 2015-2017 sebagai periode pengamatan objek sedangkan penelitian Agustina dkk. (2015) menggunakan periode 2009-2011 sebagai periode pengamatan objek.

Penelitian lain yang serupa adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suryanama (2014) yang memiliki tujuan untuk menganalisa pengaruh struktur kepemilikan manajerial, *leverage*, dan *financial distress* terhadap konservatisme akuntansi. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI periode 2009-2011. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa

struktur kepemilikan manajerial dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi. Di sisi lain, *financial distress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap konservatisme akuntansi.

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suryanama (2014) adalah penggunaan konservatisme sebagai variabel dependen serta objek penelitian yaitu perusahaan manufaktur. Perbedaan antara kedua penelitian terdapat pada variabel independen yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel ukuran perusahaan dan tidak menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Perbedaan lain terletak pada periode pengamatan. Dewi dan Suryanama (2014) menggunakan periode 2009-2011 sebagai periode pengamatan sedangkan penelitian ini menggunakan periode 2015-2017 sebagai periode pengamatan.

Selain penelitian-penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Pramudita (2012). Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa pengaruh tingkat kesulitan keuangan dan tingkat hutang terhadap konservatisme akuntansi. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2006-2010. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat kesulitan keuangan berpengaruh positif terhadap konservatisme sedangkan tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap konservatisme.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2012) adalah penggunaan konservatisme sebagai variabel dependen dan penggunaan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian. Perbedaan antara kedua penelitian adalah penelitian ini menambahkan variabel ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Perbedaan lain adalah periode pengamatan. Penelitian ini menggunakan periode 2015-2017 sebagai periode pengamatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2012) menggunakan periode 2009-2011 untuk periode pengamatan. Secara sederhana, dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Pembeda	Susanto dan Ramadani (2016)	Ramadona (2016)	Agustina, dkk., (2015)	Dewi dan Suryanama (2014)	Pramudita (2012)
Variabel Dependen	Konservatisme	Konservatisme	Konservatisme	Konservatisme	Konservatisme
Variabel Independen	<i>Leverage</i> , ukuran perusahaan, intensitas modal, likuiditas, dan <i>growth opportunities</i>	Struktur kepemilikan manajerial dan institusional, ukuran perusahaan, dan <i>leverage</i>	Ukuran perusahaan, risiko perusahaan, intensitas modal, struktur kepemilikan, dan <i>growth opportunities</i>	Struktur kepemilikan manajerial, <i>leverage</i> , dan <i>financial distress</i>	Tingkat kesulitan keuangan dan tingkat hutang
Objek Penelitian	Perusahaan manufaktur	Perusahaan makanan dan minuman	Perusahaan manufaktur	Perusahaan manufaktur	Perusahaan manufaktur
Periode Penelitian	2010-2014	2011-2014	2009-2011	2009-2011	2006-2010
Teknik Analisis	Regresi linear berganda	Regresi linear berganda	Regresi linear berganda	Regresi linear berganda	Regresi linear berganda

Sumber: Susanto dan Ramadani, 2016; Ramadona, 2016; Agustina, dkk., 2015; Dewi dan Suryanama, 2014; dan Pramudita, 2012.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme

Purnama dan Daljono (2013, dalam Susanto dan Ramadhani, 2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai perbandingan besar kecilnya perusahaan. Apabila sebuah perusahaan tergolong perusahaan besar maka pemerintah akan semakin meningkatkan pengawasannya atas perusahaan (Ramadona, 2016). Pengawasan tersebut terkait dengan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Selain itu, perusahaan berukuran besar juga diawasi dengan ketat

oleh investor, asosiasi perdagangan, serta regulator (Pravita dan Yadnyana, 2017). Semakin besar ukuran perusahaan maka makin banyak pula pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu diharapkan perusahaan melaporkan laporan keuangannya dengan lebih berhati-hati agar tidak memberi informasi yang salah kepada pemangku kepentingan.

Hipotesis biaya politik yang terdapat dalam teori akuntansi positif (Watts dan Zimmerman, 1986; dalam Bwarleling dan Mulia, 2017) juga menyatakan hal yang sama. Hipotesis ini menjelaskan bahwa perusahaan yang berukuran besar cenderung akan memilih metode akuntansi yang cenderung lebih konservatif. Argumen di atas juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Susanto dan Ramadani (2016). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme. Berdasarkan argumentasi dan penelitian terdahulu di atas maka hipotesis pertama dapat dikembangkan sebagai berikut:

H1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap konservatisme.

2.3.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap Konservatisme

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan dengan tujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang (Febrianti, 2016). Semakin rendah rasio *leverage* maka kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya juga semakin baik, namun apabila rasio *leverage* tinggi maka hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya semakin buruk (Dewi dan Suryanawa, 2014). Oleh karena itu, kreditor memiliki hak untuk melakukan pengawasan karena kreditor memiliki kepentingan untuk mengamankan dananya (Fitri, 2017). Perusahaan tersebut kemudian akan dituntut untuk lebih berhati-hati dalam melaporkan labanya karena perusahaan tidak bisa menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebenarnya saat diawasi oleh kreditor.

Teori keagenan menyatakan saat terjadi masalah dalam hubungan keagenan maka semakin besar pula proteksi yang dilakukan oleh kreditor. Dengan demikian, semakin tinggi *leverage* perusahaan, pengawasan yang dilakukan oleh kreditor juga

akan semakin ketat. Pengawasan ketat yang dilakukan diharapkan akan membuat manajemen akan bersikap lebih konservatif atau berhati-hati dalam melaporkan laba perusahaan dan tidak melakukan perekayasaan laba. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suryanawa (2014) juga mendukung argumen di atas. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap konservatisme. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan akan semakin berhati-hati dalam melaporkan labanya saat rasio *leverage* tinggi. Berdasarkan argumentasi dan penelitian terdahulu di atas maka hipotesis kedua dapat dikembangkan sebagai berikut:

H2. *Leverage* berpengaruh positif terhadap konservatisme.

2.3.3 Pengaruh *Financial Distress* Terhadap Konservatisme

Financial distress atau kesulitan keuangan adalah suatu keadaan dimana perusahaan mengalami laba negatif selama lebih dari satu periode berturut-turut (Carolina, Marpaung, dan Pratama, 2017). Kondisi ini merupakan sinyal bagi investor dan kreditor bahwa kondisi keuangan perusahaan sedang tidak baik. Apabila perusahaan menyampaikan kondisi keuangannya, maka bisa jadi investor dan kreditor tidak akan percaya pada perusahaan untuk mengelola modalnya dana yang dimilikinya (Rahayu dan Sopian, 2017). Sedangkan, untuk dapat keluar dari kondisi tersebut perusahaan tetap membutuhkan sumber pendanaan. Maka perusahaan cenderung akan kurang konservatif dalam melaporkan laporan keuangannya agar tidak kehilangan kepercayaan dari investor dan kreditor.

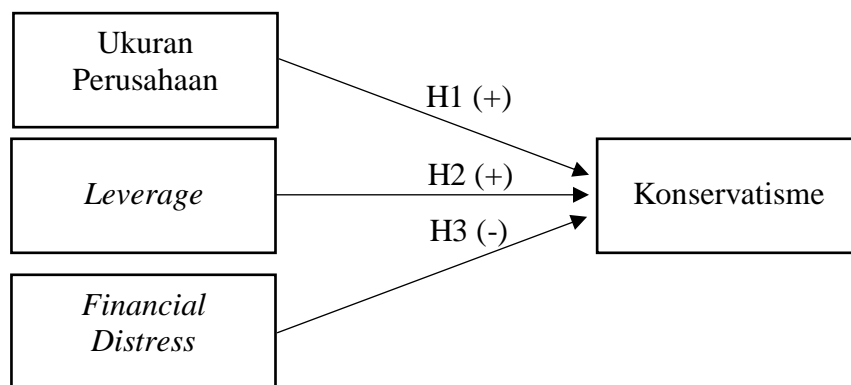
Teori keagenan atau *agency theory* juga menyatakan hal yang sama. Masalah dalam hubungan antara *principal* dengan *agent* muncul saat adanya perbedaan kepentingan (Ramadona, 2016). Manajemen perusahaan cenderung mengambil kebijakan dengan tujuan keuntungan sendiri. Pada saat mengalami kesulitan keuangan, manajemen perusahaan akan kurang konservatif dalam melaporkan kondisi perusahaan. Hal tersebut bertujuan agar investor tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Argumen di atas didukung oleh hasil penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suryanama (2014) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif

terhadap konservatisme. Berdasarkan argumentasi dan penelitian terdahulu di atas maka hipotesis ketiga dapat dikembangkan sebagai berikut:

H3. *Financial distress* berpengaruh negatif terhadap konservatisme.

2.4 Rerangka Penelitian

Gambar 2.1 berikut adalah rerangka penelitian yang digunakan untuk menggambarkan pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress* terhadap konservatisme. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, *leverage*, dan *financial distress*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah konservatisme. Model analisa selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Rerangka Penelitian